

## Analisis Aktor dan Tata Kelola Berbasis Komunitas bersama Lebah Banten di Pantai Gope (Karangantu) Pesisir Banten

<sup>1</sup>Rizki Saeful Bahri, <sup>2</sup>Reisyah Hafizh Amalia Andriani Putri, <sup>3</sup>Muhammad Daffa Pratama,

<sup>4</sup>Muhammad Adjie Akbar, <sup>5</sup>Alya Rahmah Sita

<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### ARTICLE INFORMATION

#### KEYWORD:

*Corporate Social Responsibility, ROA, ROE, ROS*

#### DOI:



This Journal is licensed under a [Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### ABSTRAK

Studi ini mengkaji politik lingkungan dalam praktik rehabilitasi dan penanaman mangrove oleh Komunitas Lebah Banten di Pantai Gope (Karangantu), Kota Serang, pada 31 Mei 2026, menggunakan kerangka ekologi politik. Penelitian kualitatif berbasis studi kasus ini melakukan observasi partisipatif dan wawancara semi-terstruktur. Temuan menunjukkan tiga dimensi utama: pertama, Lebah Banten berperan sebagai aktor tata kelola ekosistem yang mengisi kekosongan negara setelah kegagalan program rehabilitasi mangrove nasional (BRGM hanya mencapai 21,6% dari target 600.000 ha). Kedua, struktur keanggotaan yang inklusif—mencakup berbagai kelompok usia dan wilayah—menunjukkan modal sosial kuat yang menopang tata kelola komunitas. Ketiga, pengetahuan teknis dan ekologis yang diwariskan lintas generasi (mis. teknik polybag, analisis gelombang, perlindungan bibit dari kepiting) berfungsi sebagai kearifan lokal yang menantang narasi rehabilitasi top-down negara. Penanaman 900 bibit pada 31 Mei 2026 dan partisipasi spontan warga menegaskan bahwa lokasi ini merupakan arena kontestasi politik lingkungan yang dinamis, bukan sekadar upacara reboisasi. Studi ini menyoroti pentingnya peran komunitas lokal dan pengetahuan tradisional dalam strategi rehabilitasi pesisir.

**Kata kunci:** Mangrove, Rehabilitasi, Ekologi Politik, Hubungan Kekuasaan, Tata Kelola Pesisir, Lebah Banten, Komunitas Lokal

### ABSTRACT

*This study examines environmental politics in mangrove rehabilitation and planting carried out by the Lebah Banten Community at Pantai Gope (Karangantu), Serang City, on 31 May 2026, using a political ecology framework. This qualitative case study employed participatory observation and semi-structured interviews. Findings reveal three main dimensions: first, Lebah Banten acts as an ecosystem governance actor filling the governance gap left by the state after the national mangrove rehabilitation program failed to meet its target (BRGM reached only 21.6% of the 600,000-ha goal). Second, an inclusive membership structure—spanning ages and regions—demonstrates strong social capital underpinning community governance. Third, intergenerational technical and ecological knowledge (e.g., polybag techniques, wave analysis, protecting seedlings from crabs) functions as local wisdom that challenges the state's top-down rehabilitation narrative. Planting 900 mangrove seedlings on 31 May 2026, together with spontaneous participation by residents, confirms that this rehabilitation site is a dynamic arena of environmental contestation rather than merely a ceremonial reforestation effort. The study highlights the crucial role of local communities and traditional knowledge in coastal rehabilitation strategies.*

**Keywords:** Mangroves, Rehabilitation, Political Ecology, Power Relations, Coastal Governance, Lebah Banten, Local Community

### How to Cite:

Bahri, R. S., Putri, R. H. A. A., Pratama, M. D., Akbar, M. A., Sita, A. R., (2026) Analisis Aktor dan Tata Kelola Berbasis Komunitas bersama Lebah Banten di Pantai Gope (Karangantu) Pesisir Banten. *Management and Education Journal*, 4(2),40-51

### \*Author Correspondent:

Email: [1rizkib99@gmail.com](mailto:1rizkib99@gmail.com), [2reisyahhafizh2005@gmail.com](mailto:2reisyahhafizh2005@gmail.com),  
[3daffapratama2403@gmail.com](mailto:3daffapratama2403@gmail.com), [46670230138@untirta.ac.id](mailto:46670230138@untirta.ac.id), [5alyasitaudaya@gmail.com](mailto:5alyasitaudaya@gmail.com)

---

**PENDAHULUAN**

Ekosistem mangrove bukan sekadar hamparan pohon di tepi laut. Ia adalah zona kontestasi ruang di mana kepentingan ekologis, ekonomi, dan politik bertemu, berbenturan, dan dinegosiasikan. Di sinilah letak relevansi political ecology sebagai lensa analisis: bahwa degradasi dan restorasi mangrove tidak dapat dipahami semata-mata sebagai fenomena alam, melainkan sebagai produk dari relasi kekuasaan yang membentuk siapa yang boleh mengakses, mengelola, dan mendefinisikan ekosistem tersebut (Blaikie & Brookfield, 1987; Robbins, 2012).

Indonesia memiliki sekitar 3,4 juta hektar hutan mangrove, menjadikannya negara dengan mangrove terluas di dunia (Kementerian Kehutanan, 2024). Namun keunggulan kuantitatif ini tidak berbanding lurus dengan kualitas tata kelolanya. Di Provinsi Banten, kawasan pesisir Kota Serang mengalami penurunan tutupan mangrove sebesar 13,95 hektar antara 2011–2021 akibat abrasi, konversi tambak, dan penebangan ilegal (Journal of Tropical Marine Science, 2025). Di Pantai Karangantu lokasi Pantai Gope yang menjadi objek penelitian ini tekanan terhadap ekosistem mangrove semakin berat akibat pencemaran sampah dan perambahan lahan pesisir (Indonesian Conference of Maritime, 2024).

Di tingkat nasional, pemerintah melalui Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) diberi mandat rehabilitasi 600.000 hektar mangrove di sembilan provinsi berdasarkan Perpres No. 120 Tahun 2020. Namun pada akhir 2024, BRGM hanya mampu merehabilitasi sekitar 130.000 hektar atau 21,6 persen dari target (Validnews, 2024; Kompas, 2024). Kegagalan ini bukan semata soal pendanaan ini adalah kegagalan tata kelola yang struktural, yang membuka ruang bagi aktor non-negara untuk mengambil peran yang seharusnya diemban oleh negara.

Di celah kegagalan negara inilah, Komunitas Lebah Banten hadir dan bertahan. Organisasi pecinta alam yang berdiri sejak 20 Oktober 1999 ini secara konsisten menjalankan kegiatan rehabilitasi dan penyemaian mangrove di kawasan Pantai Gope, Karangantu, selama lebih dari dua dekade. Pada 31 Mei 2026, tim peneliti yang terdiri dari lima mahasiswa mata kuliah Politik Lingkungan turut serta langsung dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari observasi lapangan dan pengumpulan data mini riset. Pengalaman lapangan ini menjadi pintu masuk untuk menganalisis bagaimana sebuah komunitas lokal menjadi aktor politik lingkungan yang nyata. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini dibangun di atas tiga pertanyaan penelitian utama: 1) Bagaimana relasi kuasa antara negara, komunitas lokal (Lebah Banten), dan aktor-aktor lain termasuk masyarakat pesisir yang berpartisipasi secara spontan bekerja dalam arena rehabilitasi mangrove di Pantai Gope, 2) Narasi lingkungan apa yang mendominasi wacana rehabilitasi mangrove di kawasan ini, dan bagaimana komunitas Lebah Banten membangun kontra-narasi melalui praktik pelestarian turun-temurun, dan 3) Sejauh mana model tata kelola berbasis komunitas yang dipraktikkan Lebah Banten mencerminkan atau menantang logika governance negara dalam pengelolaan ekosistem pesisir.

**KERANGKA TEORI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan teoretis, yaitu Political Ecology yang dimana pendekatan interdisipliner yang menggabungkan ekologi, ilmu politik, dan ekonomi politik untuk memahami bagaimana relasi kekuasaan membentuk kondisi lingkungan dan

sebaliknya. Pendekatan ini lahir dari kritik terhadap apolitical ecology yakni studi lingkungan yang mengabaikan dimensi sosial-politik di balik degradasi alam (Blaikie & Brookfield, 1987). Dalam kerangka political ecology, tidak ada kerusakan lingkungan yang “alami” sepenuhnya: setiap degradasi adalah produk dari pilihan kebijakan, ketimpangan akses sumber daya, dan relasi kuasa yang tidak setara.

Paul Robbins (2012) merumuskan political ecology sebagai ilmu yang meneliti “nexus kekuasaan-pengetahuan-lingkungan”: bagaimana pengetahuan tentang alam diproduksi, oleh siapa, untuk kepentingan siapa, dan bagaimana pengetahuan tersebut digunakan untuk membenarkan atau menantang klaim atas sumber daya alam. Dalam konteks rehabilitasi mangrove, kerangka ini membantu kita bertanya: mengapa program negara gagal sementara komunitas lokal berhasil? Siapa yang mendefinisikan “rehabilitasi” yang berhasil? Dan siapa yang menanggung biaya kegagalan?

Berikut adalah tiga dimensi untuk menganalisis Political Ecology:

1. Dimensi Aktor dan Relasi Kuasa

Dimensi ini memetakan siapa saja yang terlibat dalam arena rehabilitasi mangrove negara (KLHK, BRGM, Dinas Lingkungan Hidup), komunitas lokal (Lebah Banten, nelayan, masyarakat pesisir), dan aktor sipil lainnya serta menganalisis kepentingan dan sumber daya kuasa masing-masing. Penting untuk melihat bahwa relasi kuasa tidak selalu bersifat hirarkis vertikal: komunitas lokal pun dapat menjadi aktor kuasa yang menentukan, terutama ketika negara absen (Robbins, 2012).

2. Dimensi Narasi Lingkungan (Environmental Narratives)

Forsyth (2003) dan Benjaminsen & Svarstad (2021) menunjukkan bahwa setiap krisis lingkungan selalu disertai oleh narasi yang menjelaskan penyebab dan solusinya dan narasi tersebut tidak pernah netral. Narasi dominan cenderung diproduksi oleh aktor yang berkuasa (negara, lembaga donor, media) dan seringkali menyalahkan masyarakat lokal sebagai perusak lingkungan, sembari menyembunyikan peran kebijakan ekstraktif dan kapital dalam mendorong degradasi. Penelitian ini menggunakan dimensi ini untuk mengidentifikasi narasi yang digunakan oleh Lebah Banten dan bagaimana narasi tersebut berinteraksi dengan narasi dominan negara.

3. Dimensi Tata Kelola dan Green Governmentality

Mengacu pada Agrawal (2005), dimensi ini menganalisis bagaimana proyek konservasi dan rehabilitasi termasuk yang dilakukan Lebah Banten membentuk “subjek ekologis” di kalangan komunitas pesisir. Apakah keterlibatan komunitas dalam rehabilitasi mangrove merupakan ekspresi genuine dari kecintaan terhadap alam dan kepentingan ekologis mereka? Ataukah ini merupakan bentuk neoliberal environmentalism di mana negara mengalihkan tanggung jawab ekologisnya kepada masyarakat sipil tanpa memberikan sumber daya dan pengakuan yang setimpal (Pellizzoni, 2011)?

Selain dari tiga dimensi political ecology, penelitian ini menggunakan beberapa konsep pendukung:

Konsep	Tokoh	Aplikasi pada Kasus Pantai Gope
Common-Pool Resources & Collective Action	Osteom (1990)	Mangrove sebagai commons; tata kelola kolektif Lebah Banten tanpa privatisasi negara
Environmental Justice	Schlosberg (2007)	Distribusi manfaat dan beban ekologis; suara nelayan dan masyarakat pesisir

Neoliberal Environmental	Pellizzoni (2011)	Apakah Lebah Banten mengisi gap negara dalam skema neoliberal? Implikasi bagi kedaulatan ekologis lokal
-----------------------------	-------------------	---

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal (single case study). Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian yaitu memahami makna, proses, dan relasi kuasa di balik praktik rehabilitasi mangrove berbasis komunitas. Studi kasus dipilih karena Pantai Gope merupakan lokasi dengan konteks yang khas adanya komunitas lokal aktif (Lebah Banten) yang beroperasi dalam celah kegagalan program negara yang tidak dapat dipahami secara memadai melalui survei atau data sekunder saja. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap pengurus dan anggota aktif Komunitas Lebah Banten selama kegiatan berlangsung. Pertanyaan difokuskan pada: sejarah dan identitas komunitas (berdiri 20 Oktober 1999), komposisi keanggotaan (usia, asal daerah), mekanisme tata kelola internal, teknik rehabilitasi mangrove yang dipraktikkan, relasi dengan pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup, serta tantangan utama yang dihadapi dalam kegiatan pelestarian ekosistem.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Komunitas Lebah Banten sebagai Aktor Politik Lingkungan

#### 1. Identitas, Sejarah, dan Struktur Keanggotaan

Komunitas Lebah Banten adalah organisasi pecinta alam yang didirikan pada 20 Oktober 1999 di kawasan pesisir Banten. Selama lebih dari dua dekade, komunitas ini secara konsisten dan mandiri menjalankan kegiatan rehabilitasi mangrove di kawasan pesisir Karangantu, menjadikannya salah satu aktor tata kelola ekosistem pesisir yang paling bertahan, relevan, dan efektif di wilayah Banten. Keberlanjutan Lebah Banten selama lebih dari 25 tahun merupakan pencapaian yang tidak dapat diremehkan, ia melampaui masa aktif rata-rata program rehabilitasi negara yang umumnya terikat siklus anggaran jangka pendek.

Salah satu kekuatan terbesar Lebah Banten terletak pada struktur keanggotaannya yang sangat inklusif dan lintas batas. Dari hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam, ditemukan bahwa anggota komunitas berasal dari berbagai daerah tidak hanya Banten, tetapi juga Padang, Aceh, dan Jakarta mencerminkan karakter komunitas yang melampaui batas geografis lokalitas. Temuan ini selaras dengan konsep multi-scale governance dalam ekologi politik, di mana jejaring aktor yang berskala regional atau nasional justru memperkuat efektivitas tata kelola sumber daya di level lokal (Pahl-Wostl, 2009).

Fenomena yang secara sosiologis paling menonjol adalah rentang usia anggota yang sangat lebar: dari anak-anak tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga para pensiunan. Kehadiran anggota lanjut usia yang tidak lagi memiliki pekerjaan tetap namun memilih untuk mencurahkan energi dan waktu mereka pada kegiatan pelestarian lingkungan merupakan manifestasi nyata dari apa yang oleh Agrawal (2005) disebut sebagai "ecological subject" individu yang telah menginternalisasi nilai-nilai ekologis sebagai bagian dari identitas dan makna hidup mereka, bukan sekadar respons terhadap insentif

material atau tekanan sosial eksternal.

Dalam perspektif political ecology, inklusivitas keanggotaan ini merupakan sumber daya kuasa yang signifikan. Komunitas yang memiliki anggota lintas usia, lintas daerah, dan lintas latar belakang sosial memiliki modal sosial yang lebih beragam (bridging social capital), jaringan yang lebih luas, dan legitimasi sosial yang lebih kuat dibandingkan komunitas yang homogen (Putnam, 2000). Lebah Banten bukan sekadar kumpulan individu pecinta alam, ia adalah jaringan sosial yang memungkinkan terjadinya aksi kolektif berkelanjutan untuk pengelolaan sumber daya ekosistem pesisir secara mandiri dan efektif.

Tabel 1. Profil Keanggotaan dan Karakteristik Komunitas Lebah Banten

Dimensi	Karakteristik	Implikasi dalam Political Ecology
Asal Daerah Anggota	Banten, Jakarta, Padang, Aceh (lintas provinsi)	Modal sosial yang beragam; jaringan luas melampaui batas geografis lokal
Rentang Usia Anggota	Siswa SD hingga pensiunan (lintas generasi)	Transmisi pengetahuan ekologis lokal antar generasi; keberlanjutan aksi kolektif jangka panjang
Tahun Berdiri	20 Oktober 1999 (lebih dari 25 tahun aktif)	Rekam jejak panjang sebagai legitimasi moral atas klaim pengelolaan ekosistem
Platform Komunikasi	WhatsApp, komunikasi mulut ke mulut, pertemuan tahunan (20 Oktober)	Kultur relasional yang mengutamakan kepercayaan personal di atas formalitas birokrasi
Mekanisme Konsolidasi	Perayaan ulang tahun tahunan, kegiatan alam bersama (Baduy, pantai, gunung)	Ritual komunal memperkuat identitas bersama dan komitmen kolektif terhadap pelestarian lingkungan

Sumber: Hasil Observasi dan Wawancara Lapangan, 2024.

## 2. Mekanisme Tata Kelola Internal: Tradisi, Ritual, dan Komunikasi

Tata kelola internal Lebah Banten beroperasi melalui mekanisme yang tampaknya sederhana namun terbukti efektif dalam jangka panjang. Komunikasi sehari-hari bertumpu pada grup WhatsApp sebagai platform utama koordinasi, sementara penyebaran informasi kegiatan dilakukan terutama dari mulut ke mulut sebuah pilihan yang mencerminkan kultur komunitas yang mengutamakan relasi personal dan kepercayaan interpersonal di atas ekspos media formal. Poster dan publikasi resmi hanya dibuat untuk acara-acara yang dianggap berskala besar dan memiliki dampak publik yang signifikan.

Titik konsolidasi tahunan yang paling signifikan adalah perayaan ulang tahun Lebah Banten setiap 20 Oktober. Perayaan ini selalu diisi dengan kegiatan alam yang bervariasi dari tahun ke tahun: kunjungan ke komunitas Baduy, kemah di pantai, pendakian gunung (termasuk Mandalawangi), atau kegiatan pesisir lainnya. Ritual tahunan ini berfungsi ganda: sebagai mekanisme konsolidasi identitas komunitas sekaligus sebagai forum informal untuk merencanakan agenda rehabilitasi ke depan. Ini adalah contoh konkret dari apa yang Turner (1969) sebut sebagai ritual komunal yang memperkuat komunitas rasa kebersamaan dan tujuan bersama yang melampaui perbedaan status dan latar belakang individual.

Mekanisme tata kelola informal ini sangat relevan dilihat melalui lensa Ostrom (1990) tentang tata kelola sumber daya milik bersama (common-pool resources). Lebah Banten berhasil mempertahankan aksi kolektif jangka panjang tanpa privatisasi maupun sentralisasi kewenangan oleh negara sebuah pencapaian yang, menurut Ostrom,

bergantung pada tiga elemen fundamental: kepercayaan antar anggota, aturan informal yang disepakati bersama, dan mekanisme sanksi sosial yang efektif. Di Lebah Banten, ketiga elemen ini terwujud melalui identitas bersama sebagai pecinta alam dan komitmen moral kolektif yang direproduksi melalui ritual tahunan dan keterlibatan partisipatif lintas generasi.

### **Arena Rehabilitasi Mangrove Relasi Kuasa di Pantai Gope**

#### **1. Pemetaan Aktor dan Kepentingan**

Kegiatan rehabilitasi mangrove di Pantai Gope, kawasan pesisir Karangantu, melibatkan setidaknya tiga kelompok aktor utama dengan kepentingan, sumber kuasa, dan posisi dalam tata kelola yang berbeda-beda. Perbedaan ini tidak bersifat statis melainkan dinamis ia terus dinegosiasikan melalui praktik-praktik sehari-hari di lapangan dan melalui mekanisme formal seperti pengajuan proposal kepada institusi negara. Pemetaan aktor berikut dikembangkan berdasarkan kerangka analisis aktor dalam political ecology (Robbins, 2012) dan teori stakeholder analysis (Reed et al., 2009)

Paradoks kuasa yang menjadi temuan sentral penelitian ini: negara memiliki kuasa formal yang lebih besar (anggaran, regulasi, wewenang hukum), tetapi justru lebih lemah secara operasional di lapangan. Lebah Banten, sebaliknya, tidak memiliki kewenangan formal atas kawasan pesisir Karangantu, tetapi justru menjadi aktor yang paling efektif dalam mengelola ekosistem tersebut selama lebih dari dua dekade. Ini adalah manifestasi nyata dari apa yang dalam literatur political ecology disebut sebagai governance gap: celah antara otoritas formal negara dan kapasitas operasional aktualnya (Robbins, 2012).

#### **2. Relasi Asimetris: Komunitas sebagai Pelaksana, Negara sebagai Pemberi Dana**

Dari wawancara lapangan dengan pengurus dan anggota Lebah Banten, ditemukan bahwa mekanisme hubungan antara komunitas dan pemerintah daerah bersifat kondisional dan asimetris. Untuk kegiatan berskala besar yang membutuhkan pembiayaan bibit dan perlengkapan, Lebah Banten harus mengajukan proposal formal kepada Dinas Lingkungan Hidup (Dinas LH). Dinas LH dapat memberikan dana, namun dengan prasyarat administratif yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebuah mekanisme yang mencerminkan bagaimana birokrasi negara bekerja tidak selalu melalui pemaksaan langsung, tetapi melalui pembentukan prosedur dan kategori administratif yang menentukan siapa yang diakui dan dalam kapasitas apa.

Pola hubungan ini mengandung kontradiksi mendasar yang perlu dibaca secara kritis melalui lensa neoliberal environmentalism (Pellizzoni, 2011). Di satu sisi, mekanisme ini memberikan ruang bagi komunitas untuk mengakses sumber daya negara. Di sisi lain, ia secara implisit menempatkan komunitas dalam posisi sub-kontraktor negara bertanggung jawab atas pekerjaan pelestarian ekosistem yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara, tanpa memiliki otoritas formal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan tentang kawasan yang mereka jaga.

Lebih jauh, mekanisme proposal ini secara implisit mendefinisikan ulang peran komunitas: dari guardian of the common's yang memiliki hak dan otoritas moral atas ekosistem yang mereka rawat, menjadi service provider yang bergantung pada persetujuan birokrasi. Ini adalah contoh konkret dari bagaimana state power bekerja tidak selalu melalui pemaksaan, tetapi melalui pembentukan prosedur dan kategori administratif yang menentukan siapa yang diakui sebagai aktor legitimate dan dalam kapasitas apa (Agrawal, 2005; Li, 2007).

### 3. Partisipasi Spontan Masyarakat: Legitimasi Sosial sebagai Modal Kuasa

Fenomena yang secara khusus menarik perhatian peneliti selama observasi lapangan adalah kehadiran masyarakat sekitar Pantai Gope yang bukan anggota resmi Lebah Banten, namun secara spontan ikut berpartisipasi dalam kegiatan penanaman mangrove. Mereka yang biasanya beraktivitas di sekitar kawasan pesisir nelayan, pedagang kecil, atau warga pesisir biasa tergerak untuk ikut menanam, meskipun keterlibatannya tidak terencana dan tidak terstruktur secara formal dalam agenda kegiatan.

Fenomena ini perlu dibaca dalam dua lapisan analitis. Pada lapisan pertama, partisipasi spontan ini adalah indikasi tumbuhnya kesadaran ekologis organik di kalangan masyarakat pesisir sebuah proses pembentukan "subjek ekologis" (Agrawal, 2005) yang berlangsung melalui interaksi jangka panjang dengan komunitas Lebah Banten, bukan melalui program penyuluhan top-down pemerintah. Pada lapisan kedua, partisipasi ini merupakan sumber legitimasi sosial yang kuat bagi Lebah Banten: komunitas ini diakui dan diterima oleh masyarakat sekitar sebagai aktor yang punya otoritas moral atas pengelolaan ekosistem pesisir setempat.

Dalam kerangka political ecology, legitimasi sosial ini adalah bentuk kuasa yang tidak kalah pentingnya dari kuasa formal negara. Ia memungkinkan Lebah Banten untuk menggerakkan partisipasi kolektif tanpa instrumen koersif negara sebuah pencapaian yang menjawab pertanyaan mengapa komunitas lokal seringkali lebih berhasil dalam konservasi dibanding program top-down yang didanai miliaran rupiah per hektar namun tanpa melibatkan pengetahuan dan komitmen lokal (Berkes, 2009).

### Narasi Lingkungan: Siapa yang Mendefinisikan Masalah Mangrove?

#### 1. Narasi Dominan Negara: Masyarakat sebagai Perusak

Narasi dominan yang tertanam dalam kebijakan rehabilitasi mangrove nasional yang dapat dibaca dari desain program Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dan berbagai dokumen kebijakan terkait menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor yang kurang sadar lingkungan dan perlu diedukasi serta dibimbing oleh tenaga ahli dari luar. Dalam narasi ini, degradasi mangrove dipandang terutama sebagai akibat dari perilaku masyarakat yang merusak (penebangan, alih fungsi lahan untuk tambak) dan solusinya adalah program rehabilitasi skala masif yang dikelola dan dikontrol oleh aparaturnegara.

Narasi ini, dalam kacamata Forsyth (2003), merupakan environmental narrative yang sarat muatan kuasa: ia menyederhanakan kausalitas yang sesungguhnya sangat kompleks menjadi kesalahan komunal masyarakat pesisir, sementara faktor-faktor struktural yang jauh lebih menentukan seperti kebijakan perizinan tambak industrial, konversi lahan pesisir untuk infrastruktur pembangunan, dan lemahnya penegakan hukum terhadap perusak ekosistem berskala besar secara sistematis tidak masuk ke dalam bingkai (frame) "masalah" yang perlu diselesaikan.

#### 2. Kontra-Narasi Komunitas: Pewarisan Tradisi sebagai Resistensi

Lebah Banten, melalui praktik rehabilitasi yang telah berlangsung sejak 1999, secara implisit membangun kontra-narasi yang secara langsung menantang framing dominan negara. Narasi komunitas ini menempatkan masyarakat lokal bukan sebagai perusak yang perlu ditertibkan, melainkan sebagai guardian of the common's yang telah menjaga ekosistem mangrove jauh sebelum program rehabilitasi negara manapun hadir. Bukti materiil dari kontra-narasi ini sangat konkret dan dapat diverifikasi: pohon-pohon mangrove yang saat ini tumbuh subur dan rimbun di kawasan Pantai Gope sebagian besar

adalah hasil tanam para senior Lebah Banten dari generasi-generasi sebelumnya, yang kini diwarisi dan dilanjutkan oleh generasi muda.

Secara lebih halus, tradisi turun-temurun ini juga merupakan bentuk resistensi terhadap logika governance negara yang bersifat siklus-program (ada anggaran, ada kegiatan; habis anggaran, selesai kegiatan). Lebah Banten beroperasi dalam logika yang sepenuhnya berbeda: kegiatan rehabilitasi dilakukan sesering mungkin sesuai ketersediaan waktu anggota, tanpa harus menunggu siklus anggaran atau instruksi dari atas. Bila ada anggota yang memiliki waktu luang, kegiatan penyemaian atau penanaman akan segera diorganisir sebuah model responsivitas organik yang tidak mungkin direplikasi oleh birokrasi negara manapun, seberapa besar pun anggarannya. Ini adalah contoh nyata dari apa yang Scott (1985) sebut sebagai "weapons of the weak" bentuk resistensi yang tidak selalu konfrontatif, tetapi secara konsisten mempertahankan otonomi dan praktik komunitas di luar kontrol negara.

### Pengetahuan Ekologis Lokal sebagai Arena Politik

#### 1. Teknik Rehabilitasi: Kearifan Turun-Temurun yang Berdampak Ekologis

Salah satu temuan paling kaya dan paling bernilai dari observasi lapangan adalah kedalaman pengetahuan teknis-ekologis yang dimiliki Komunitas Lebah Banten. Pengetahuan ini bukan pengetahuan akademis yang diperoleh dari literatur ilmiah ia adalah kearifan yang terakumulasi selama lebih dari dua dekade praktik langsung di lapangan, diwariskan dari generasi senior ke generasi junior melalui mekanisme partisipasi langsung (learning by doing) yang alamiah dan efektif. Ini adalah contoh khas dari apa yang Berkes (2009) sebut sebagai Traditional Ecological Knowledge (TEK) sistem pengetahuan yang dibangun melalui pengamatan dan pengalaman jangka panjang dalam ekosistem tertentu, dan yang seringkali lebih akurat dan lebih kontekstual dibanding pengetahuan teknis formal yang diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi lokal.

Selama observasi kegiatan rehabilitasi berlangsung, pengurus Lebah Banten memberikan arahan teknis komprehensif kepada peserta yang mencakup beberapa prinsip utama yang dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 3. Prinsip Teknis Rehabilitasi Mangrove Komunitas Lebah Banten dan Relevansinya dengan Ecological Mangrove Restoration (EMR)

Prinsip	Praktik Komunitas Lebah Banten	Relevansi Dengan Standar EMR
Jarak Tanam	Penanaman dengan jarak teratur antar bibit untuk optimasi ruang dan nutrisi	Sesuai prinsip EMR: menghindari kompetisi ruang yang melemahkan pertumbuhan mangrove (Ecological Mangrove Restoration, Lewis, 2005)
Analisis Kondisi Gelombang	Evaluasi tinggi gelombang sebelum penanaman untuk memastikan akar sempat mencengkeram substrat	Sesuai prinsip EMR: pertimbangan hidrologi sebagai faktor penentu keberhasilan penanaman (Field, 1999)
Teknik Polybag & Perlindungan dari Kepiting	Bibit disemaikan di polybag, bagian bawah diikat untuk melindungi dari predasi kepiting	Sesuai prinsip EMR: meminimalkan tekanan biotik pada fase kritis pertumbuhan bibit muda (Primavera & Esteban, 2008)
Masa Tunggu	Bibit dipindahkan ke lokasi	Sesuai prinsip EMR: kesiapan ekologis

Bibit	permanen hanya setelah daun pertama muncul	bibit sebagai indikator keberhasilan transplantasi (Bosire et al., 2008)
Dimensi Moral & Komitmen	Menanam "dari hati": komitmen moral, bukan karena insentif finansial atau program pemerintah	Melampaui standar EMR: membentuk subjek ekologis yang berkomitmen

Sumber: Observasi lapangan dan wawancara dengan pengurus Komunitas Lebah Banten, 2024; Lewis (2005); Field (1999); Primavera & Esteban (2008); Bosire et al. (2008).

## 2. Implikasi Politik dari Pengetahuan Lokal

Dalam perspektif political ecology, pengetahuan ekologis lokal ini bukan sekadar informasi teknis yang relevan secara praktis ia adalah sumber kuasa politik yang dapat digunakan untuk mengklaim otoritas yang legitimate dalam pengelolaan ekosistem. Komunitas yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ekosistem yang mereka kelola memiliki argumen yang kuat untuk menuntut pengakuan formal dan keterlibatan bermakna dalam proses pengambilan keputusan tentang ekosistem tersebut (Forsyth, 2003; Agrawal, 2005).

Sayangnya, dalam praktik tata kelola yang berlaku saat ini, pengetahuan lokal Lebah Banten belum secara formal diakui dan diintegrasikan ke dalam kebijakan rehabilitasi mangrove nasional. Program BRGM yang gagal mencapai target rehabilitasi sebagaimana dianalisis secara mendalam oleh para pakar ekologi mangrove (Mongabay, 2025), salah satunya disebabkan oleh kegagalan mengintegrasikan pengetahuan lokal tentang kesesuaian ekologis lokasi penanaman, kondisi hidrologi, dan karakteristik substrat setempat. Ini adalah ironi politik lingkungan yang mendasar: sementara komunitas lokal sudah sejak lama mempraktikkan rehabilitasi yang lebih efektif dan lebih sesuai konteks ekologis, program negara berskala masif yang didanai dengan anggaran jauh lebih besar justru mengabaikan kearifan yang sudah terbukti ada.

## Tradisi, Regenerasi, dan Tata Kelola Lintas Generasi

Salah satu aspek yang paling membedakan model tata kelola Lebah Banten dari program rehabilitasi negara adalah dimensi lintas generasi yang tertanam organik dalam praktiknya. Kegiatan penyemaian dan penanaman mangrove di Pantai Gope telah berlangsung sejak komunitas ini berdiri pada 1999 dan terus berlanjut hingga hari ini sebuah kontinuitas yang sama sekali tidak terdapat dalam program pemerintah yang terikat oleh siklus anggaran dan masa jabatan pejabat. Banyak pohon mangrove yang saat ini tumbuh rimbun di kawasan Pantai Gope adalah warisan penanaman para senior komunitas dari bertahun-tahun bahkan belasan tahun silam.

Generasi muda yang terlibat hari ini termasuk anggota termuda yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar meneruskan tradisi ini bukan karena diperintah atau diberi insentif finansial, tetapi karena mereka dibesarkan dalam kultur komunitas yang menganggap pelestarian mangrove sebagai bagian integral dari identitas diri dan komunitas. Proses sosialisasi nilai ekologis ini berlangsung melalui partisipasi langsung dalam kegiatan bersama, bukan melalui instruksi formal atau kurikulum pendidikan lingkungan di sekolah. Ini adalah manifestasi dari proses pembentukan subjek ekologis yang dikonseptualisasikan oleh Agrawal (2005) di mana keterlibatan berulang dalam praktik konservasi membentuk ulang cara seseorang memandang dirinya dalam relasi dengan alam.

Dimensi lintas generasi ini memiliki implikasi ekologis yang sangat nyata dan dapat

diukur. Ekosistem mangrove yang terbentuk dari penanaman yang konsisten selama lebih dari dua dekade jauh lebih kompleks dan resilient dibandingkan hamparan mangrove yang ditanam serentak dalam satu program intensif lalu dibiarkan tanpa pemeliharaan. Diversitas usia pohon yang dihasilkan oleh tradisi tanam yang berkelanjutan menciptakan struktur kanopi berlapis yang mendukung lebih banyak keanekaragaman hayati dan memberikan perlindungan abrasi yang lebih efektif (Barbier et al., 2011).

Ini adalah argumen ekologis sekaligus politis yang kuat: model tata kelola berbasis komunitas yang bersifat lintas generasi menghasilkan ekosistem yang secara ekologis lebih sehat dan lebih tahan lama daripada program rehabilitasi massal yang bersifat temporal. Implikasi kebijakan dari temuan ini sangat jelas: investasi dalam penguatan komunitas lokal seperti Lebah Banten tidak hanya dalam bentuk dana proyek, tetapi pengakuan hukum, jaminan akses terhadap kawasan, dan dukungan kelembagaan jangka panjang jauh lebih efektif dan lebih efisien secara ekonomi daripada program rehabilitasi top-down berskala besar yang mengabaikan modal sosial dan pengetahuan lokal yang telah ada (Berkes, 2009; Agrawal, 2005).

### **Evaluasi Model Rehabilitasi: EMR vs Penanaman Seremonial**

Pakar rehabilitasi mangrove yang dipublikasikan di Mongabay (2025) menegaskan bahwa kegagalan banyak program rehabilitasi, termasuk BRGM, berakar pada metodologi, penanaman dilakukan secara masif tanpa mempertimbangkan kesesuaian ekologis lokasi, terutama kondisi hidrologi, pasang surut, dan substrat. Pendekatan yang lebih efektif adalah Ecological Mangrove Restoration (EMR) yang berfokus pada pemulihan kondisi hidrologis agar mangrove dapat tumbuh secara alami.

Dievaluasi melalui lensa EMR, praktik Lebah Banten menunjukkan keselarasan yang signifikan dengan beberapa prinsip EMR, perhatian terhadap kondisi gelombang sebelum penanaman (pertimbangan hidrologis), masa tunggu bibit hingga daun muncul (pertimbangan kesiapan ekologis), teknik polybag yang meminimalkan shock pada bibit (pertimbangan biologis), dan prinsip jarak tanam yang teratur (pertimbangan ruang ekologis).

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi aspek yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar EMR, belum ada mekanisme monitoring dan evaluasi formal yang sistematis untuk mengukur tingkat keberhasilan penanaman dalam jangka panjang (survivalitas bibit, pertumbuhan, kondisi ekologis keseluruhan kawasan). Kegiatan rehabilitasi juga masih bersifat event-based meskipun dilakukan sesering mungkin, belum ada rencana tata ruang penanaman jangka panjang yang mengintegrasikan peta kondisi hidrologi dan substrat kawasan secara komprehensif.

Meski demikian, dengan seluruh keterbatasan sumber daya yang ada, pencapaian Lebah Banten tetap jauh lebih signifikan dibanding program negara, mereka berhasil membangun ekosistem mangrove yang telah bertahan dan berkembang selama lebih dari dua dekade, pencapaian yang tidak dapat diklaim oleh program BRGM dengan anggaran jauh lebih besar.

### **Keadilan Lingkungan dalam Tata Kelola Mangrove Pantai Gope**

Melalui kerangka environmental justice Schlosberg (2007), tata kelola rehabilitasi mangrove di Pantai Gope dapat dievaluasi dalam tiga dimensi:

1. Keadilan Distributif, Siapa yang menanggung beban kerusakan ekosistem, dan siapa

- yang menikmati manfaat rehabilitasi? Di kawasan Karangantu, degradasi mangrove akibat konversi tambak dan pencemaran terutama merugikan nelayan kecil dan masyarakat pesisir yang bergantung pada ekosistem tersebut untuk penghidupan. Namun manfaat rehabilitasi yang dilakukan Lebah Banten bersifat lebih merata ekosistem yang pulih memberikan perlindungan abrasi dan pemulihan stok ikan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat pesisir.
2. Keadilan Prosedural, Apakah masyarakat pesisir memiliki suara yang bermakna dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi? Di sinilah model Lebah Banten memiliki kelebihan dibanding program pemerintah, keputusan diambil secara kolektif oleh komunitas yang inklusif, mencakup berbagai lapisan usia dan latar belakang. Namun, partisipasi perempuan pesisir dan nelayan kecil dalam struktur pengambilan keputusan Lebah Banten belum cukup terdokumentasi dalam penelitian ini dan perlu digali lebih lanjut.
  3. Keadilan Pengakuan, Apakah pengetahuan lokal Lebah Banten diakui sebagai sumber otoritas yang legitimate dalam tata kelola ekosistem pesisir? Pada level komunitas dan sosial lokal, jawabannya adalah legitimasi sosial Lebah Banten tercermin dari partisipasi spontan masyarakat sekitar. Namun pada level kebijakan formal, pengetahuan lokal mereka masih belum mendapat pengakuan hukum yang setimpal. Tidak ada regulasi daerah yang secara eksplisit mengakui peran komunitas seperti Lebah Banten sebagai mitra setara dalam pengelolaan ekosistem pesisir Banten.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penelitian ini menegaskan bahwa rehabilitasi mangrove di Pantai Gope oleh Komunitas Lebah Banten bukan sekadar kegiatan ekologis teknis ia adalah praktik politik lingkungan yang kompleks, yang merepresentasikan respons akar rumput terhadap kegagalan struktural tata kelola negara atas ekosistem pesisir. Dari perspektif political ecology, temuan penelitian ini dapat diringkas dalam tiga argumen utama. Pertama, Lebah Banten adalah bukti nyata bahwa komunitas lokal mampu menjadi aktor tata kelola ekosistem yang efektif dan berkelanjutan, bahkan dalam kondisi keterbatasan sumber daya dan absennya dukungan formal negara. Modal sosial yang inklusif (lintas usia dan daerah), pengetahuan ekologis lokal yang mendalam, dan tradisi turun-temurun yang kuat merupakan sumber daya kuasa yang tidak kalah pentingnya dari anggaran negara.

Kedua, relasi antara Lebah Banten dan negara (Dinas LH) bersifat asimetris dan mengandung dinamika neoliberal environmentalism komunitas mengemban tanggung jawab ekologis yang seharusnya menjadi kewajiban negara, sementara negara mempertahankan kontrol formal melalui mekanisme proposal dan persetujuan. Model ini perlu ditransformasi menuju skema co-management yang lebih setara, di mana komunitas mendapat pengakuan hukum dan otoritas yang sesuai dengan peran ekologis yang mereka emban.

Ketiga, pengetahuan ekologis lokal Lebah Banten tentang teknik polybag, analisis gelombang, ancaman kepiting, jarak tanam, dan tradisi pewarisan merupakan aset kebijakan yang belum dioptimalkan. Integrasinya ke dalam desain program rehabilitasi mangrove nasional pasca-BRGM berpotensi meningkatkan efektivitas program secara signifikan dan menjawab penyebab utama kegagalan rehabilitasi yang terlalu mengandalkan pendekatan teknis tanpa konteks ekologis dan sosial lokal.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agrawal, A. (2005). *Environmentality: Technologies of Government and the Making of Subjects*. Duke University Press.
- ANTARA News. (2025). Pemerintah Lakukan Kajian, Tetapkan Target Baru Rehabilitasi Mangrove. <https://antaranews.com/berita/4975969>.
- Benjaminsen, T. A., & Svarstad, H. (2021). *Political Ecology: Critical Engagement*. Palgrave Macmillan.
- Blaikie, P., & Brookfield, H. (1987). *Land Degradation and Society*. Methuen.
- Ecobiz Asia. (2025). Dari BRGM ke Kemenhut, Strategi Rehabilitasi Mangrove Butuh Konsistensi. <https://ecobiz.asia>.
- Forsyth, T. (2003). *Critical Political Ecology: The Politics of Environmental Science*. Routledge.
- Indonesian Conference of Maritime. (2024). Kondisi Ekosistem Mangrove Kawasan Pantai Karangantu. Prosiding ICOMAR.
- Journal of Tropical Marine Science. (2025). Perubahan Luas Mangrove di Pesisir Kota Serang Tahun 2011–2021. [journal.ubb.ac.id/jtms/article/download/4058/2676](http://journal.ubb.ac.id/jtms/article/download/4058/2676).
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). Data Tutupan Hutan Mangrove Nasional 2024. KLHK.
- Kompas/Lestari. (2024). Masalah Mendasar Rehabilitasi Mangrove. <https://lestari.kompas.com/read/2024/02/29/084608586>.
- Maksum, M.J.S., Mutammimah, N.C. (2025) *Kepemimpinan Transformatif Dan Komitmen Organisasi*, Lima Aksara, Jombang
- Maksum, M.J.S. (2026). *Budaya Organisasi*, Cetakan 1, Cirebon, Lovrinz Publishing
- Mongabay Indonesia. (2023). Studi: Target Program Restorasi Mangrove Mendapat Kendala Kesesuaian Lahan. <https://mongabay.co.id>.
- Mongabay Indonesia. (2025). Opini: Menilik Strategi Rehabilitasi Mangrove yang Efisien. <https://mongabay.co.id/2025/09/22>.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Peet, R., & Watts, M. (1996). *Liberation Ecologies: Environment, Development, Social Movements*. Routledge.
- Pellizzoni, L. (2011). Governing through disorder: Neoliberal environmental governance and social theory. *Global Environmental Change*, 21(3), 795–803.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.
- Portal Nusantara. (2025). MAPALA GEMPA UNBAJA Lakukan Ekspedisi Penanaman Mangrove di Pantai Gope Karang Antu. <https://portalnusantara.id>.
- Robbins, P. (2012). *Political Ecology: A Critical Introduction* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Schlosberg, D. (2007). *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*. Oxford University Press.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Validnews. (2024). Target Tinggi Rehabilitasi Mangrove Zonder Bukti. <https://validnews.id>.